

DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	18
1.3 Tujuan Penelitian.....	19
1.4 Manfaat Penelitian.....	20
1.5 Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
2.1 Landasan Teori.....	23
2.1.1 Teori Perjanjian.....	23
2.1.1.1 Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata....	23
2.1.2 Teori Keberlakuan Perjanjian Internasional dalam Hukum Nasional.....	27
2.1.2.1 Pengertian Perjanjian Internasional.....	27
2.1.2.2 Subjek Hukum Perjanjian Internasional.....	29

2.1.2.3 Peristilahan Perjanjian Internasional.....	31
2.1.2.4 Prinsip Perjanjian Internasional.....	35
2.1.2.5 Pengesahan Perjanjian Internasional.....	37
2.1.3 Teori Kepastian Hukum.....	43
2.1.3.1 Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum.....	43
2.2 Landasan Konseptual.....	46
2.2.1 Profesi Notaris.....	46
2.2.1.1 Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Notaris.....	46
2.2.1.2 Kewenangan, Kewajiban, Larangan, Pengawasan dan Sanksi Notaris.....	48
2.2.1.3 Tanggungjawab Notaris.....	60
2.2.1.4 Kekuatan Pembuktian Akta Notaris dan Akta Dibawah Tangan....	65
2.2.2 Prosedur dan Tata Cara Legalisasi di Indonesia.....	72
BAB III METODE PENELITIAN.....	77
3.1 Jenis Penelitian.....	77
3.2 Jenis Data.....	78
3.3 Cara Perolehan Data.....	84
3.4 Jenis Pendekatan.....	84
3.5 Metode Analisa Data.....	86
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	88
4.1 Hasil Penelitian.....	88
4.1.1 Tesis.....	88
4.1.2 Jurnal Nasional.....	92

4.1.3 Naskah Urgensi.....	98
4.1.4 Seminar.....	103
4.2 Analisis Pengaturan dan Prosedur atas Legalisasi Dokumen Publik Pasca Pengesahan <i>The Hague Convention Abolshing The Requirement of Legalizatio for Foreign Public Documents</i> 1961 Melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing di Indonesia.....	107
4.2.1 Pengaturan dan Prosedur atas Legalisasi Dokumen Publik di Indonesia Sebelum Pengesahan <i>The Hague Convention Abolshing The Requirement of Legalization for Foreign Public Documents</i> 1961.....	107
4.2.2 Pengaturan dan Prosedur atas Legalisasi Dokumen Publik di Indonesia Pasca Pengesahan <i>The Hague Convention Abolshing The Requirement Of Legalization For Foreign Public Documents</i> 1961.....	114
4.2.3 Pengaturan dan Prosedur atas Legalisasi Dokumen Publik di Indonesia Pasca Pengesahan <i>The Hague Convention Abolshing The Requirement of Legalization For Foreign Public Documents</i> 1961 ditinjau dari Teori Kepastian Hukum.....	138
4.3 Analisis Peran Notaris, Keabsahan, dan Pertanggungjawaban Notaris dan Dokumen Publik lainnya Pasca Akses Terhadap <i>The Hague Convention Abolshing The Requirement of Legalization For Foreign Public Documents</i> 1961 Melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengesahan <i>Convention Abolishing The Requirement of Legalization for Foreign Public Documents</i> Dikaitkan dengan Kewenangan Notaris Untuk Melakukan Legalisasi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.....	142
4.3.1 Peran Notaris dan Keabsahan dari Proses Legalisasi Terhadap Dokumen Notaris dan Dokumen Publik Pasca Akses Terhadap <i>The Hague Convention Abolshing The Requirement of Legalization For Foreign Public Documents</i> 1961 Melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengesahan <i>Convention Abolishing The Requirement of Legalization for Foreign Public Documents</i>	142
4.3.2 Pertanggungjawaban Notaris atas Legalisasi Dokumen Notaris dan Dokumen Publik Pasca Akses Terhadap <i>The Hague Convention Abolshing The Requirement of Legalization For Foreign Public Documents</i> 1961 Melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia	

Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengesahan <i>Convention Abolishing The Requirement of Legalization for Foreign Public Documents</i>	151
BAB V PENUTUP.....	159
5.1 Kesimpulan.....	159
5.2 Saran.....	162
DAFTAR PUSTAKA.....	164
DAFTAR DIAGRAM DAN GAMBAR.....	
Diagram 4.1 Prosedur Legalisasi Dokumen Publik dari Indonesia yang Akan digunakan ke Luar Negeri	112
Diagram 4.2 Prosedur Legalisasi Dokumen Publik dari Luar Negeri yang Akan Digunakan di Indonesia.....	113
Diagram 4.3 Diagram Alur Penerbitan Sertifikat Apostille di Indonesia.....	132
Gambar 4.1 Format Formulir Spesimen.....	136
Gambar 4.2 Contoh Sertifikat Apostille.....	137
Gambar 4.3 Contoh Spesimen.....	138

